



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUTAN DI KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN BALANTAK KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Fitriani Abdullah¹, Yunus Papea²

*fitrianiabdullah39@gmail.com*¹

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu¹
Pascasarjana Administrasi Publik, Universitas Tadulako²

ABSTRACT

This study focuses on the purpose of knowing and describing the implementation of forest protection policies in the Balantak Forest Management Unit, Banggai Regency, Central Sulawesi Province. The usefulness of this research is Theoretical and Practical. The Literature Review explains the concept of public administration, the concept of public policy, the concept of policy implementation, and the concept of forest protection. The flow of thought by the theory of Van Meter and Van Horn which includes the Standards and Objectives, Resources, Characteristics or Nature of the Implementing Agency, Inter-Organizational Communication, Implementor Disposition and the Socio-Economic and Political Environment Research with qualitative methods, Research Location Balantak Forest Management Unit Banggai district, Research time for three months, Informants are elements of the Apparatus who implement the policy and Village Apparatus as the parties involved, Operational Definition Concept related to the model implementation of the policy. Types of qualitative data, and data sources are secondary data and primary data. The discussion clearly explains the implementation of forest protection policies in the Balantak KPH area, and concludes that the results of observations, interviews, documentation with stakeholders, as well as in-depth analysis of researchers in the field can be concluded that the implementation of forest protection policies in the Balantak Forest Management Area, Banggai Regency, Province Central Sulawesi has been running well, but there are still major problems, including in the aspect of; (1) Social, Economic and Political conditions of this aspect are the aspects that greatly influence the implementation of forest protection policies because the impact of this aspect is in the form of targeted forest utilization such as the development of tourism objects to improve the community's economy, pine forest management. (2) The basic measures, objectives of the policy, have not been maximized in implementation or application, in other words that the objectives of the policy are still partial, in this case the determination is the leader of the unit, (3) Human resources are still very lacking in mastery and have qualified skills so that they have not been able to compete and implement the latest regulatory policies, (4) Communication is still not optimal at the implementing and community stages, Policy determination, lack of socialization or communication by competent parties in implementing regulatory policies on forest protection and utilization.

Keywords: Policy Implementation of Forest

LATAR BELAKANG

Kebijakan perlindungan hutan Tujuannya adalah untuk memberi pedoman dan arah guna menjamin tercapainya penyelenggaraan kehutanan, yaitu “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan” Setelah terbit Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.635/Menhut-II/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Seluas 94.759 (Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan) hektar. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas 8.409 (Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas 91 (Sembilan Puluh Satu) Hektar di Provinsi Sulawesi Tengah berpengaruh pada luas wilayah KPHP Model Balantak. KPHP ini memiliki luas areal ±109.779 ha, yang terdiri atas Hutan Lindung seluas 31.524 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 54.299 ha, dan Hutan Produksi seluas 23.956 ha.

Dengan demikian, perencanaan jangka panjang di tingkat KPH akan menjadi Pedoman dan acuan bagi seluruh kegiatan pengelolaan hutan jangka pendek, khususnya di wilayah KPH Balantak. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sekaligus juga berfungsi sebagai standar penilaian kinerja pembangunan KPH, yang mengakomodir strategi dan kelayakan pengembangan pengelolaan hutan ditinjau dari aspek kelola kawasan, kelola hutan, dan penataan kelembagaan. Rencana Pengelolaan KPHP Balantak, yang akan menjadi acuan rencana pengelolaan jangka pendek, diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi produksi dan jasa sumberdaya hutan dan lingkungannya, baik produksi kayu, produksi bukan kayu, maupun jasa-jasa lingkungan, melalui kegiatan pokok berupa pemanfaatan, pemberdayaan

masyarakat, serta pelestarian lingkungan yang merupakan satu kesatuan kegiatan.

Perencanaan pengelolaan jangka panjang ini dapat menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang bermanfaat dan lestari, yang melibatkan semua pihak (*multi stakehokders*) dalam upaya pengembangan KPHP Balantak di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Melihat fenomena atau realita yang terjadi bahwa dikawasan hutan lindung yang telah beralih fungsi, yaitu diantaranya menjadi perkebunan masyarakat, perambahan kayu, eksplorasi perusahaan pertambangan, objek wisata, masalah tersebut menjadi pekerjaan yang berat bagi petugas dilapangan dalam mensosialisasi aturan atau regulasi yang mengatur bahwa Kawasan Hutan Lindung tidak bisa rusak atau beralih fungsi. Karena akan berdampak negative bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Oleh sebab itu saya merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan perlindungan Hutan di KPH Balantak Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan prinsip kualitatif. Berbagai informasi penelitian akan diambil hingga cukup untuk dianalisis berdasarkan prosedur dari prinsip metodologi kualitatif. Untuk penelitian ini penulis memilih jenis atau tipe penelitian deskriptif - kualitatif.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2004).“Pendekatan kualitatif adalah “suatu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati”. Sedangkan Nasution (1996) berpandangan bahwa “ Metode penelitian *naturalistic* disebut juga

metode kualitatif, sebab tahap pengumpulan data dilakukan secara kualitatif”.

PEMBAHASAN

Setelah didapatkan fakta empirik yaitu telah dilakukan wawancara kepada informan kemudian di bandingkan dengan teori tentang aspek tersebut selaku peneliti menganalisis dan memberikan deskripsi secara mendalam bahwa telah terjadi proses implementasi kebijakan yang cukup baik, relevan dengan teori yang dipakai, tetapi masih perlu menambahkan atau melengkapi aspek tersebut dengan teori yang paling cocok untuk hal tersebut agar tercipta produk berupa regulasi yang mengatur standar atau ukuran tentang perlindungan hutan tersebut. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai sebuah kebijakan publik memerlukan sebuah dukungan penuh dari semua pihak dalam mengimplementasikannya. Hal ini dikarenakan 60 persen keberhasilan sebuah kebijakan publik sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan publik tersebut, Implementasi kebijakan publik merupakan hal yang paling terberat dalam semua rangkaian proses sebuah kebijakan publik baik dibandingkan dengan perumusan, monitoring, maupun evaluasi kebijakan publik. Hal ini disebabkan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik terkadang harus berhadapan dengan berbagai kompleksitas permasalahan yang tidak dijumpai dan diprediksi dalam konsep awal.

Sumber daya manusia fakta dilapangan masih terdapat sumber daya manusia yang kurang cakap dalam arti masih dibawah rata – rata *skill* atau kemampuan menghadapi persoalan dengan bersentuhan langsung karenakan mereka belum menguasai iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi), kurangnya pelatihan yang berwawasan teknologi salah satu penyebab mereka lambat

dalam menerapkan aturan – aturan revisi regulasi terbaru. Sehingga mengakibatkan penanganan perlindungan hutan kurang maksimal yang berjalan dengan lambat atau *slow action*. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan/program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan itu dirumuskan tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Tanpa sumber daya yang memadai pula suatu implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Adapun sumber daya yang dimaksud adalah jumlah orang atau staff/implementor sebagai pelaksana yang mempunyai keahlian yang memadai, informasi, dan fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya.

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program, Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, sebagai mana yang pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

Komunikasi antar organisasi dari semua unsur atau pihak terkait sudah menjalin komunikasi dengan baik, hanya saja dalam suatu organisasi publik, dalam kesatuan misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain,

sering mengalami gangguan (*Truble*) baik yang disengaja ataupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. Namun didalam pelaksanaan kebijakan perlindungan hutan tersebut terjalnin hubungan komunikasi yang baik.

Disposisi dalam implementasi kebijakan perlindungan hutan bahwa apabila teori dipraktekan dalam pelaksanaan kebijakan yaitu sikap aparatur masih kurang jujur, dikarekan *keyinforman* telah membenarkan hal tersebut, *keyinforman* menjelaskan bahwa dalam penentuan kebijakan peramabahan hutan yang menentukan langkah selanjutnya adalah pimpinan kesatuan, yang masih banyak mempertimbangkan hal – hal sosial walaupun perambah telah melanggar aturan yang berlaku dalam perlindungan hutan lindung. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Kebijakan perlindungan hutan dari aspek sosial, ekonomi dan politik merujuk pada realita atau kondisi empirik yang terjadi bahwa terori yang dipakai sangat sinkron dengan apa yang terjadi dilapangan. Aspek – aspek tersebut sebagai inti dari keseluruhan

aspek yang mana namun dalam kebijakan tersebut tidak maksimal melakukannya, harus ada revisi kembali dalam pembuatan regulasi dalam penentuan implementasi kebijakan perlindungan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan Balantak kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, hasil observasi, wawancara, dokumentasi dengan pihak *stakeholders*, serta analisis secara mendalam peneliti dilapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan hutan di Kawasan Pengelolaan Hutan Balantak Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan dengan baik hanya saja masih terdapat permasalahan yang utama yaitu di antaranya pada aspek ; (1) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik aspek ini adalah aspek yang sangat memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan perlindungan hutan dikarenakan dampak dari aspek ini berupa pemanfaatan hutan yang tepat sasaran seperti pengembangan obek wisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, pengelolaan Hutan pinus. (2) Ukuran dasar dan tujuan kebijakan, belum maksimal dalam pelaksanaan atau penerapannya dalam kata lain bahwa tujuan dari kebijakan masih ada keberpihakkan dalam hal ini penentuannya adalah pimpinan kesatuan, (3) Sumber daya manusia masih sangat kurang

mengusai dan memiliki *skill* yang mumpuni sehingga mereka belum mampu bersaing dan mengimplementasikan kebijakan regulasi terbaru, (4) Komunikasi masih kurang maksimal pada tahap pelaksana dan masyarakat, Penentuan kebijakan, kurangnya sosialisasi atau komunikasi oleh pihak yang berkompeten dalam penerapan kebijakan regulasi tentang perlindungan dan pemanfaatan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik*. CAPS. Yogyakarta
- [2] Budi Winarno. 2014. *Kebijakan Publik (edisi & revisi terbaru)*. CAPS. Yogyakarta
- [3] Deddy Mulyadi. 2002. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung
- [4] Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- [5] Elizabeth Rata, Roger Openshaw. 2004. *Public Policy and Ethnicity*. Palgrave. Macmillan
- [6] Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.
- [7] Farid Ali. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Refika Aditama. Bandung
- [8] Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta. Jakarta
- [9] Miftah Thoha. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Konteporer*. Kencana. Jakarta
- [10] Muchlis Hamdi. 2014. *Kebijakan publik: proses, analisis, dan partisipasi*. Ghalia Indonesia
- [11] Ricky Istamto. 1991. *Pengantar kebijakan publik (public policy)*. Jakarta
- [12] Sahya Anggara. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Pusaka Setia. Bandung
- [13] Sahya Anggara, 2014. *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia. Bandung
- [14] Said Zainal Abidin. 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika. Jakarta
- [15] Solahuddin Kusumanegara, *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Bukusap. Bandung.
- [16] Suaedi, Wardiyanto. 2010. *Revitalisasi Administrasi (Revitalisasi Birokrasi Dan E-Governance)*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- [17] Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung
- [18] Wayne Parnos. 2002. *Public Policy*. Prenada Media. Jakarta
- [19] Yerimias T Keban. 2014. *Enam Dimensi Administrasi Publik*. Gavamedia. Yogyakarta.